

DAFTAR PUSTAKA

- ACE Electoral Knowledge Network, Encyclopedia: Electoral Integrity: Guiding Principles of Electoral Integrity, Electoral Integrity-Guiding Principles.htm
- ACE-Electoral Knowledge Network*, “Voluntary versus Mandatory Registration” dan “Self initiated versus State-initiated Registration”.
- Ackerman, Bruce, *We the People Foundation*, Harvard University Press, 1991
- Agresto, John, *The Supreme Court and Constitutional Democracy*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1984
- Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008, tertanggal 6 Juli 2009
- Analisis Daftar Pemilih Tetap yang disampaikan anggota KPU RI pada Bimbingan Teknis Daftar Pemilih Tetap di KPU RI, 2008
- Andersen, Goul J. dan Hoff, Jens. 2001. *Democracy and Citizenship in Scandinavia*. New York: Palgrave
- Bagian Penjelasan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Bahan Kajian KPU dalam merumuskan tindaklanjut atas ketentuan Undang-Undang No.42 tahun 2008 khususnya menyangkut pematkhiran dan penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009



Bahan paparan Dirjen Adminduk, A. Rasyid Saleh pada waktu rapat koordinasi penyiapan DP4 di KPU antara KPU dan Kemendagri tanggal 20 Februari 2008

Bangladesh Election Commission, Bangladesh Elections 2008: *Factsheet*, Dhaka: Public Relations Branch, Bangladesh Election Commission, 2010

Bangladesh Election Commission, pada www.ec.org.bd

Barber, B, *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*, Berkeley: University of California, 1984.

Bellamy, Richard, *Political Constitutionalism: A Republican Defence of the Constitutionality of Democracy*, UK: Cambridge University Press, 2007

Birch, Sarah, 2011, 'Electoral Institutions and Popular Confidence in Electoral Processes: A Cross national Analysis', *Electoral Studies*, page 27.

Brownlee, Jason. 2009. "Portents of Pluralism: How Hybrid Regimes Affect Democratic Transition." *American Journal of Political Science* 53(3): 515

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008, hal.107

Central Election Commission of The Russian Federation, *State Automated System of the Russian Federation " VYBORY"*, Moscow: 2011

Daftar Pertanyaan Panitia Hak Angket Kepada KPU, 20 Agustus 2009



Dagger, Richard, *Civic Virtue, Right, Citizenship and Republican Liberalism*,
Oxford Political Theory, ed (David Miller and Alan Ryan), New
York-Oxford, Oxford University Press, 1997, p.23

Dagger, Richard. 2002. “*Republican Citizenship*,” *Handbook of Citizenship
Studies*, eds. Engin F. Isin dan Bryan Turner. London: Sage
Publication, hlm. 152

Dahl, Robert A, *Dilemmas of Pluralist Democracy, Autonomus vs Control*,
Yale University Press, 1982, p.6

Dalton, Russel J. dan Martin P. Wattenberg, “ *The Not So Simple Act of
Voting*” dalam W. Finifter (ed), *Political Science: The State of The
Discipline*, Washington, American Political Science Association,
1993.

Data Pokja PPLN KPU RI 2009

Economist Intelligent Unit, *Democracy Index*, UK, 2015

Election Commission of India, *Nurturing Indian Democracy*, 2010.

El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana,
Jakarta, 2007, hlm. 47-55.

Encyclopedia Americana, 1999, Vol.16, hlm. 742

Grand Desain Pendaftaran Penduduk, Kemendagri

Gratschew, Maria, “Compulsory Voting” dalam IDEA, *Voter Turnout Since
1945: A Global Report*, 2002.

Gugatan Mega Pro ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara
1601/PAN.MK/VII/2009.

Hart, H.L.A *The Concept of Law*, Oxford, the Clarendon Press, 1961, p.58.



Hasil dialog tentang Daftar Pemilih Tetap pada Konsolidasi Regional I KPU wilayah Jawa di di hotel Marbella, Anyer, 2008

Hasil Rapat Pleno KPU RI tanggal 13 Mei 2009 dimana antara lain memutuskan untuk mengakomodir keperluan KPU Kabupaten/Kota untuk memperpanjang waktu pendataan DPS agar diperoleh Dftar Pemilih Tetap yang valid untuk keperluan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Indrayana, Denny. 2008. Negara Antara Ada dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan. Jakarta: Kompas, h.163

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), *Electoral System Design*, 2006, Printed by: Bulls Graphics, SE-103 34 Stockholm Sweden, page 22.

Interview with Michael Sandel, On Republicanism and Liberalism by Leif Wenar and Chong-Min Hong, *The Harvard Review of Philosophy*, Spring 1996, p.66

Kajian Divisi Pemutakhiran Daftar Pemilih KPU, 2008

Katz, 2001, Work, Democracy, and Citizenship, epilogue of *The Price of Citizenship: Redefining the American Welfare State*. New York: Metropolitan Books.

Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 109-117.

Keputusan KPU No. 23 tahun 2004 tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004.

Keputusan KPU No. 235 Tahun 2002 mengatur tentang Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B).



Keputusan KPU No. 365/KPTS/KPU/2009 tentang penetapan hasil suara
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VI/2009 yang mengatur
tentang penggunaan KTP disertai KK dan Paspor untuk pemilih di
luar negeri yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

Keputusan rapat Paripurna DPR RI, 26 Mei 2009 yang memutuskan ada 28
orang anggota Panitia Hak Angket DAFTAR PEMILIH TETAP

Keterangan Ketua dan Anggota KPU, tanggal 5 Juli 2009

Keterangan Ketua KPU, Hafidz Ansyari di Kemendagri, 5 April 2008

Keterangan KPU tentang penyerahan DP4 dan DAK2 untuk keperluan
pemilu 2009

Keterangan KPU terkait penganggaran pemilu, 4 Juli 2008

Komnas HAM, Laporan Tim Penyelidikan Pemenuhan Hak Sipil dan Politik
Dalam Pemilu Legislatif 2009, Jakarta: Komnas HAM, 2009.

KPU RI, Rekapitulasi Suara Nasional Pemilu 1997, Jakarta: KPU RI

KPU, Berita KPU "Jumlah Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
153.357.307, TPS 561.393 buah", *www.kpu.go.id.*, diakses pada
tanggal 12 Desember 2013, pukul 16.04 WIB.

KPU, *Buku Saku Pemilu 2009*, Jakarta, 2010

KPU, *Modul KPU Pemilu Untuk Pemula*, Jakarta: KPU RI, h.13.

Kwak, Jun Hyeok, *Global Citizenship with Civic Responsibility*, Korea
University, Departement of Political Sciences, 2008

Lampiran paparan materi Dirjen Adminduk pada waktu Rapat Koordinasi
penyiapan DP4 di KPU, tanggal 20 Februari 2008



Laporan akhir: Jakarta: Misi Pemantauan Pemilu Uni Eropa di Indonesia
2004, halaman 7.

Laporan Evaluasi Integritas Proses dan Hasil Pemilu 2009, Jakarta:
Kemitraan..

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2009, Jakarta: Komisi Pemilihan
Umum, 2010.

Laporan Ketua Panitia Angket Daftar Pemilih Tetap yang disampaikan oleh
Ketua Panitia Hak Angket tanggal 29 September 2009, hal. 4-5.

Laporan Ketua Pansus Drs. Ferry Mursyidan Baldan dalam rangka
pembicaraan tingkat pengambilan keputusan RUU Pemilu Anggota
DPR, DPD dan DPRD dan RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
pada Rapat Paripurna tanggal 28 Februari 2008

Laporan tentang Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 yang
disusun oleh Misi Pemantauan Pemilu Uni Eropa di Indonesia tahun
2004, *Ibid.*

Laporan Tim Penyelidikan Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Dalam Pemilu
Legislatif 2009, Jakarta: Komnas HAM, 2009.

Laporan Tim Perumus Kepada Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu Anggota
DPR, DPD dan DPRD, rabu 20 Februari 2008, DPR RI, hal.3,
dokumen resmi.

Lay, Cornelis, *Involusi Politik: Esei-esei Transisi Indonesia*, (Yogyakarta,
PLOD dan JIP Fisipol UGM, 2006), hal .65

Losco, Joseph dan Williams, Leonard, 2003, *Political Teory*, kajian Klasik
dan Kontemporer volume II, Rajawali Press, Jakarta, hal. 118



- Lydersen, Kenneth M. 2011. *Democratic Citizenship Education in Indonesia post-Suharto: Political indoctrination or critical democratization?*. Tesis pada Universitas Oslo; Mouffe, 1993. *The return Of Political*. London: Verso
- Mahfud MD, Moh., *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 127-135.
- Mahfud, M.D, Moch. *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2001. Hlm. 24-25
- Marshall, T.H, *Citizenship and Social Class*, Cambridge University Press, 1950
- Moleong, Lexy J. *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008
- Mozaffar, Shaheen and Schedler, Andreas, “The Comparative Study of Electoral Governance: Introduction”, *International Political Science Review* (2002), Vol.23, No.1, 5-27¹
- Mozaffar, Shaheen, 2002, ‘Patterns of Electoral Governance in Africa’s Emerging Democracies’ *International Political Science Review*, 23/1.
- Murphy, Mark C., *Natural Law Theory*, dalam Martin P. Golding and William A. Edmundson (ed), *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory*, Blackwell Publishing, Malden USA, 2006, p.18-12
- Naskah Akademik RUU Pemilu Legislatif yang disiapkan oleh Pemerintah yang disampaikan pada tanggal 25 Mei 2007 dengan Surat Pengantar No. R-27/Pres/05/2007 hal.5-7.



Naskah Akademik RUU Pemilu Legislatif yang disampaikan tanggal 25 Mei 2007 hal.18.

Neumann, Franz , *The Rule of Law: Political Theory and the Legal System of Modern Society*,

Notulensi Rapat Koordinasi Penyiapan DP4 antara KPU dengan Kemendagri tanggal 20 Februari 2008

Nugraha, Rizky, *Perancangan Sistem Informasi Administrasi kependudukan (SIAK) sebagai Pengembangan E-Government Menuju Good Governance*, Juni 27, 2009.

Nylen, William R., *Participatory Democracy Versus Elitis Democracy, Lessons From Brazil*, Palgrave Macmillan, 2003, p.3

Pandangan DPD terhadap Penjelasan Pemerintah tentang RUU Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang disampaikan pada sidang tanggal 14 AGUSTUS 2007

Pasal 21 ayat (3) *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 10 Desember 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pendapat Akhir Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi yang disampaikan oleh Drs. Ali Mochtar Ngabalin, MSi, pada tanggal 28 Februari 2008, dokumen sidang paripurna resmi.

Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional yang disampaikan oleh Dra. Hj. Andi Yuliani Paris, MSc pada tanggal 28 Februari 2008

Pendapat Akhir Fraksi PPP DPR RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, 28 Februari



2008 oleh Juru Bicara Fraksi PPP DPR RI Hj. Lena Mariana Mukti,
dokumen sidang paripurna resmi.

Penjelasan KPU Bangladesh dalam presentasinya sewaktu berkunjung ke
KPU RI, 2010

Penjelasan KPU pada Rapat Dengar Pendapat tanggal 4 Oktober 2007

Penjelasan KPU Yahukimo kepada Anggota KPU Korwil Papua di kantor
KPU RI, 2008

Penjelasan Pemerintah atas RUU Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
yang disampaikan oleh pemerintah dengan surat No: R
27/Pres/05/2007 tertanggal 25 Mei 2007 dan dilakukan pembahasan
mulai tanggal 10 Juli 2007

Penjelasan tentang Anggaran Pemilu 2009 tahun 2008 dan 2009 dalam Rapat
Dengar Pendapat pada November 2007

Peraturan KPU No. 10 tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 tanggal
18 Februari 2009

Peraturan KPU No. 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota

Peraturan KPU No.06/2008

Peraturan KPU No.32 tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Peraturan
KPU No.10 tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009, tanggal
18 April 2009

Peraturan KPU No.45 tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan
KPU Nomor 10 tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 32 tahun 2009, tanggal 27 Mei 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 10 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum.

Pintor, Rafael Lopez and Gratschew, Maria” Voter Registration and Inclusive Democracy: Analysing Registration Practices Worldwide” dalam IDEA, *Voter turnout Since 1945: A Global Report*, 2002

Pokok-Pokok Penjelasan Ketua KPU sebagai Saksi Panitia Hak Angket DPR RI tentang Pelanggaran Hak Konstitusi Warga Negara Untuk Memilih, yang disampaikan pada tanggal 26 Agustus 2009

Posner, Eric, The Case Against Human Right, The Guardian.com pada Kamis, 4 Desember 2014 diakses 21 Juni 2017 jam 18.04

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009

Qadir, Shahid, Clapham, Christopher, Gills, Barry, Sustainable Democracy: Formalism vs substance”, *Third World Quarterly*, Vo. 14, No.3, 1993,

Ralph Schroeder (ed), *Max Weber, Democracy and Modernisation*, United Kingdom, Macmillan Press, 1998, p.20



Rawls, John, *A Theory of Justice*, original edition, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1971, hal.57

Rawls, John, Kantian Constructivism in Moral Theory, *Journal of Philosophy* (September 1980), p.544

Rekomendasi Tim Prakarsa Pemutakhiran data, 2009.

Renja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota tahun 2008-2009, bahan RDP KPU tanggal 4 Oktober 2007

Resume rapat koordinasi DAFTAR PEMILIH TETAP, hotel Borobudur, Juni 2008

Riewanto, Agus, "Masa Depan Pemilu 2009", opini *Suara Merdeka*, 19 Oktober 2007

Risalah RDP dengan KPU tanggal 30 Agustus 2007.

Schattschneider, EE, *The Semi Sovereign People, a realistic View of Democracy in America*, Holt, Rinehart and Winston, USA, 1960

Schumpeter, Joseph A, *Capitalism, Socialism and Democracy*, Chapter 21, London: Allen and Unwin, 1976

Sekretariat Komisi II, DPR RI, Risalah Rapat Pansus RUU Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Masa Persidangan III, IV, tahun 2007-2008

Seputar Indonesia edisi Kamis, 2 Juli 2009

Shedler, Andreas, *Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition*, Boulder, Colorado, Lynne Rienner, 2006, p.6

Siaran Pers YBHI, Negara Wajib Melindungi Terhadap Hak Untuk Tidak Memilih Dalam Pemilu, diakses tanggal 1 Juni 2010.



Siaran Pers YBHI, Negara Wajib Melindungi Terhadap Hak Untuk Tidak Memilih Dalam Pemilu, diakses tanggal 1 Juni 2010.

Skema Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009

Skema penyiapan DP4 dari pemerintah sesuai UU 23 tahun 2006.

Soemartono, Dr. Ir. Hj. Triyuni, MM dan Hendrastuti, SH, MM, Sri, *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*, Bandung: Yayasan Bina Profesi Mandiri, 2011, hal.190

Sommers, Margaret R. 2008. *Geneologies of Citizenship*. Cambridge: Cambridge University Press.

Surat edaran KPU No 2311/15/VII/2008

Surat Edaran KPU No. 859/15/IV/2008 perihal pembentukan dan pengangkatan PPK, PPS dan PPDP untuk pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009

Surat Edaran KPU No.2604/15/VIII/2008 perihal Daftar Pemilih Sementara,

Surat Edaran KPU Nomor 1232 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan KTP dan Paspor.

Surat Edaran KPU Nomor 1247/KPU/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 Perihal Pengecekan/Validasi Dftar Pemilih Tetap

Surat Edaran KPU Nomor No. 687/KPU/IV/2009 tanggal 10 April 2009 perihal Pemutakhiran data Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009

Surat Edaran No. 688/KPU/IV/2009 tanggal 11 April 2009 perihal fasilitasi Pemda dalam rangka pemutakhiran daftar pemilih.



Surat Edaran Nomor 1206/KPU/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009 perihal Edaran Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Surat Edaran Nomor 1247/KPU/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 Perihal Pengecekan/Validasi Daftar Pemilih Tetap

Surat Edaran Nomor 607/KPU/ III/2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang Coklit Daftar Pemilih Tetap

Surat Edaran Nomor 720/KPU/IV/2009 tanggal 17 April 2009 perihal Pemutakhiran data Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009

Surat Edaran Nomor 768/KPU/IV/2009 tanggal 27 April 2009 perihal Pemutakhiran Data Pemilih, yang ditujukan kepada DPP Parpol

Surat Edaran Nomor 918/KPU/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 perihal Masa Pemutakhiran DPS dan Pengumpulan Daftar Pemilih Tetap.

Surat Edaran Nomor 924/KPU/V/2009 tanggal 22 Mei 2009 perihal Pendaftaran Pemilih pada tempat-tempat khusus seperti misalnya RS, lapas/rutan, penampungan TKI, kelompok masyarakat Adat sebagai upaya KPU untuk mendata pemilih yang kemungkinan belum terdata karena kebetulan bertempat tinggal atau berada di tempat-tempat tersebut. Meskipun dalam undang-undang, tidak dikenal dengan TPS khusus, pemilih yang terdaftar pada tempat-tempat ini akan diberikan kesempatan untuk melakukan pemungutan suara pada TPS terdekat atau mempunyai TPS tersendiri.

Surat KPU No.774/15/X/2007 tertanggal 5 Oktober 2007 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, Menteri/Kepala Bappenas dan Ketua Komisi II DPR RI.

Surat KPU No.908/15/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 perihal Permohonan Bantuan dan Fasilitas Departemen Dalam Negeri untuk Pemilu 2009



Surat Tim Kampanye Nasional Mega – Prabowo Nomor 089/EX/TKN-
MP/VII/2009 tanggal 4 Juli 2009

Surat Edaran KPU nomor 1232/KPU/VII/2009 2009 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan KTP dan Paspor, *ibid.*

Tajuk Kompas, Selasa 30 Juni 2009

Tata Cara Kerja Panitia Hak Angket pada Laporan Panitia Hak Angket DPR
RI tentang Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara untuk
Memilih yang disampaikan oleh Ketua Panitia Hak Angket Prof. Dr.
T. Gayus Lumbuun, SH, MH tanggal 29 September 2009, hal.2-3.

The Venice Commission at *ACEEEO*, 2009

The World Books Encyclopedia, 1999, Vol.4, hlm. 568

Torres, Luis Eduardo Medina and Diaz, Edwin Cuitlahuac Ramirez,
“Electoral Governance: More Than Just Electoral Administration”,
Mexican Review Law Series VIII at
<http://www.scielo.org.mx/pdf/mlr/v8n1/v8n1a2.pdf>, diakses pada 27
Desember, 2016 jam 16.04

Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang No 12 Tahun 2003 pasal 53-59

Undang-Undang No.22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

United Nations office of The High Commissioner for Human Right " General
Comment No 25: The Right to Participate In Public Affairs, Voting
Right and The Right of Equal Access to Public Service", 7 December
1996, paragraf 20.

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.



UU No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya pasal 1.

UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif

UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik

UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

UUD 1945

Victoria Costa, 2004

Vontz, Thomas. 2000. *We Project Citizens*. Washington: USAID, hlm. 38

Wall, Alan et all, *Electoral Management Design*, The International IDEA Handbook, 2006, p.65

Walzer, Michael, What Rights for Illiberal Communities dalam Daniel A Bell and Avner de-Shalit (Ed), *Forms of Justice. Critical Perspective's on David Miller's Political Philosophy*, United Kingdom: Rowman and Littlefield Publishers.Inc, 2003, p.126-131

Wiegfield, Allan dan Eccles, Jacquelyn S., Expectancy Value Theory of Achievement motivation, *Contemporary Education Psychology* 25, page 68-81 (2000) pada <http://rcgd.isr.umich.edu/garp/articles/eccles00o.pdf> yang diakses pada 3 February 2016 jam 19.25

Zittel, Thomas and Fuch, Dieter, Participatory Democracy and Political Participation, Can Participatory engineering bring citizens back in?,



Routledge, Taylor and Francis group, London and New York: 2007,
hal.12

Sumber dari internet:

<http://aceproject.org/ace-en/topics/vr/onePage> diakses tanggal 23 Januari
2017 jam 8.36

<http://gamil-opinion.blogspot.co.id/2009/04/ketika-warga-dipaksa-golput.html> diakses pada 27 Januari 2016 dimana hal itu menunjukkan bahwa KPU lah yang harus disalahkan.

<http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0275074003251379>, Moynihan, Donald. P, *Normative and Instrumental Perspective on Public Participation*, (2003)

<http://koran.kompas.com/read/xml/2009/07/07/04001339/ktp.untuk.memilih>

<http://news.detik.com/berita/837842/inilah-7-anggota-kpu-2007-2012> diakses pada 23 Januari 2016 jam 13.20



<http://news.okezone.com/read/2008/02/23/1/86195/incumbent-kerahkan-pns-dan-honda>

<http://politik.news.viva.co.id/news/read/62934-dewan-sahkan-28-anggota-pansus-hak-angket-daftar-pemilih-tetap> yang diakses pada tanggal 20 Februari 2016 jam 16.35

<http://www.antaraneews.com/berita/78157/dpr-ikut-melegitimasi-hasil-seleksi-anggota-kpu-cacat-hukum> “DPR Ikut Melegitimasi Hasil Seleksi Anggota KPU Cacat Hukum” diakses pada 25 Januari 2016 jam 19.18

<http://www.antikorupsi.org/id/content/anggota-kpu-terpilih-berstatus-tersangka-syamsul-bahri-terkait-kasus-korupsi-di-malang> diakses pada 25 Januari 2016 jam 14.20

<http://www.antikorupsi.org/id/content/presiden-minta-rakyat-didengar-tujuh-anggota-kpu-ditetapkan> diakses pada 25 Januari 2016 jam 18.47

<http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/tertib-administrasi-kependudukan> yang ditulis 2 Maret 2014, diakses pada 3 Februari 2016 jam 16.20

<http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/tertib-administrasi-kependudukan> diakses tanggal 3 Februari 2016 jam 18.26

<http://www.jprr.or.id/content/view/99/43> Mawardi “Pilkada: Pemilihan Kacau Data, Sebuah Refleksi

<http://www.justiceharvard.org/resources/jeremy-bentham-principles-of-morals-and-legislation-1780/> diakses pada 26 Januari jam 19.30

<http://www.kemendagri.go.id/news/2010/12/17/mendagri-penerbitan-nik-tunggal-selesai-2011> diakses pada 3 Februari 2016



[http://www.lp3es.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=189
&Itemid=73](http://www.lp3es.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=189&Itemid=73), 1 Agustus 2008, Audit Daftar Pemilih Pemilu 2009, :
diakses 28 Februari 2011.

<http://www.politikindonesia.com>, “Ketua MPR: Anggota KPU Baru Mesti
Belajar dari Pengalaman” diakses pada 26 Januari 2016 jam 18.40

[http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=105
3](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1053), diakses tanggal 24 Januari 2016 jam 10.20

[http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/24654/ssoar-2000-
mouffe-
liberative democracy or agonistic pluralism.pdf?sequence=1](http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/24654/ssoar-2000-mouffe-liberative-democracy-or-agonistic-pluralism.pdf?sequence=1)
akses tanggal 21 Maret 2016 jam.16.04

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0710/29/nas22.htm> “Sandungan Moral
bagi KPU Baru” yang diakses pada 24 Januari 2016 jam 15.36

www.aceproject.org , ACE-Electoral Knowledge Network, “Overview of
Voter Registration” dan “Guiding Principles of Voter Registration”
yang diakses pada 20 Agustus 2015 jam 11.20

[www.bl.uk/learning/histcitizen/21cc/strugge/suffrage/suffragettesback
ground. html](http://www.bl.uk/learning/histcitizen/21cc/strugge/suffrage/suffragettesbackground.html) yang diakses pada 2 Februari 2017 jam 16.04

www.legaltheoryandjurisprudence.blogspot.com Austin, John, Command
Theory of Law, yang menginisiasi munculnya Jurisprudensi. H.L.A
Hart, The Concept of Law, diakses pada 19 Januari 2017 jam 17.00

www.thirdworldtraveler.com/Democracy/On_Democracy_Dahl.html+ yang
diakses 2 Juni 2015